



PEMERINTAH KECAMATAN TANETE RIATTANG



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2022



 [KerjaNYATAneteRiattang](#)

 [Kecamatan Tanete Riattang](#)

**ANDI KUMALA DEWI SALAHUDDIN, S.STP.,M.Si
CAMAT TANETE RITTANG**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat-Nya, sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022 dapat diselesaikan, sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan selama Tahun 2022.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2021 merupakan capaian akuntabilitas kinerja pada tahun keempat dalam masa Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023.

Penyusunan LKjIP Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022 merupakan bentuk komitmen terhadap aspek transparansi dan akuntabilitas serta pertanggungjawaban atas kinerja Kecamatan Tanete Riattang.

Cakupan LKjIP Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022 terdiri atas: Pendahuluan, Perencanaan & Perjanjian Kinerja, Akuntabilitas Kinerja dan inovasi dalam skema reformasi birokrasi. Pendahuluan memiliki muatan uraian singkat organisasi, seperti : latar, maksud, isu strategis, dan struktur serta keragaman sumberdaya manusia di Kecamatan Tanete Riattang. Adapun aspek Perencanaan dan Perjanjian Kinerja menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran, IKU dan PK. Sedangkan aspek akuntabilitas kinerja, memberikan gambaran capaian, analisa, dan evaluasi terhadap indikator kinerja utama Kecamatan Tanete Riattang pada tahun 2019, termasuk atas analisa efisiensi penggunaan sumberdaya.

Berkenaan dengan itu, LKjIP Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022 ini, dapat menjadi masukan dan saran evaluasi agar kinerja kedepan menjadi lebih produktif, efektif dan efisien, baik dari aspek perencanaan, pengorganisasian, manajemen keuangan maupun koordinasi pelaksanaannya.

SalekoE, Februari 2023

Kamat Tanete Riattang,



ANDY KUMALA DEWI SALAHUDDIN, S.STP., M.Si
NIP. 19870830 200602 2 001

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Organisasi	2
C. Isu Strategis	4
D. Aspek Strategis Organisasi	6

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Dan Sasaran	11
B. Strategi Dan Arah Kebijakan organisasi.....	12
C. Indikator Kinerja Utama	14
D. Perjanjian Kinerja	15
E. Standart Penilaian Kinerja	16

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi	19
1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022	19
2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023	20
3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	21
4. Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standart Nasional Lainnya serta dengan Kecamatan Kota sekitar	22
5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	24
6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	27
B. Realisasi Anggaran	35

BAB IV PERENCANAAN KINERJA

A. Simpulan Umum	39
B. Kendala Pelaksanaan Dan Upaya Mengatasi	39
C. Kaleidoskop	41

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi SDM Organisasi Kecamatan Tanete	6
Tabel 2.1	Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023....	14
Tabel 2.2	Tabel Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanete Riattang	15
Tabel 2.3	Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang	16
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tahun 202.....	17
Tabel 2.5	Tabel Skala Pengukuran	18
Tabel 2.6	Tabel Skala Perhitungan Kinerja Untuk Indiaktor Evaluasi SAKIP oleh APIP	19
Tabel 3.1	Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022	21
Tabel 3.2	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2020.	22
Tabel 3.3	Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023	23
Tabel 3.4	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	24
Tabel 3.5	Tabel Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standart Nasional Lain	24
Tabel 3.6	Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Sekitar	25
Tabel 3.7	Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya.....	29
Tabel 3.8	Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	26
Tabel 3.9	Tabel Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja	30
Tabel 3.10	Tabel Realisasi Keuangan Kecamatan Tanete Riattang Tahun Anggaran 2022	37



BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

B. ORGANISASI

C. ISU STRATEGIS

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI



BAB I PENDAHULUAN



LATAR BELAKANG

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien dan efektif. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, di mana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja SKPD Kecamatan Tanete Riattang

Proses penyusunan LKjIP dilakukan pada setiap akhir tahun anggaran bagi setiap Instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi kinerja setiap instansi pemerintah, yang dalam hal ini adalah Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang. LKjIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggung-jawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

Mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, LKjIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

LKjIP Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah selama kurun waktu 1 (satu) tahun secara sistematis dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Penyusunan LKjIP juga menjadi alat kendali untuk mendorong peningkatan kinerja setiap unit organisasi.

LKjIP Kecamatan Tanete Riattang merupakan proses untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran yang selanjutnya dianalisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan. Identifikasi keberhasilan, permasalahan dan solusi yang tertuang dalam LKjIP, menjadi sumber untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang. Dengan pendekatan ini, LKjIP sebagai proses evaluasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari perbaikan yang berkelanjutan di pemerintah untuk meningkatkan kinerja pemerintahan melalui perbaikan pelayanan publik.

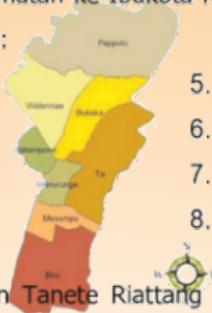
B. ORGANISASI

Kecamatan Tanete Riattang merupakan salah satu dari 27 (dua puluh tujuh) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Provinsi Sulawesi Selatan dengan luas wilayah 23,79 Km² (1,07% dari total luas Kecamatan di Kabupaten Bone) terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan dengan jumlah penduduk pada Desember 2022 adalah 88.159 jiwa terdiri dari 29.260 laki-laki dan 58.899 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga 13.171 KK. Kecamatan Tanete Riattang termasuk daerah beriklim sedang dengan curah hujan berkisar rata-rata 1.750 - 2.000 mm, dengan batas-batas sebagai berikut :

- ✓ Sebelah Utara berbatasan dengan Kecamatan Awangpone Kabupaten Bone
- ✓ Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang Timur Kab. Bone
- ✓ Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Barebbo Kabupaten Bone
- ✓ Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tanete Riattang Barat Kabupaten Bone

Kecamatan Tanete Riattang berada pada kategori lokasi Dataran yang mempunyai jarak tempuh 5 Km dari Ibukota Kecamatan ke Ibukota Kabupaten, dan secara administrasi terdiri dari 8 (delapan) Kelurahan yaitu:

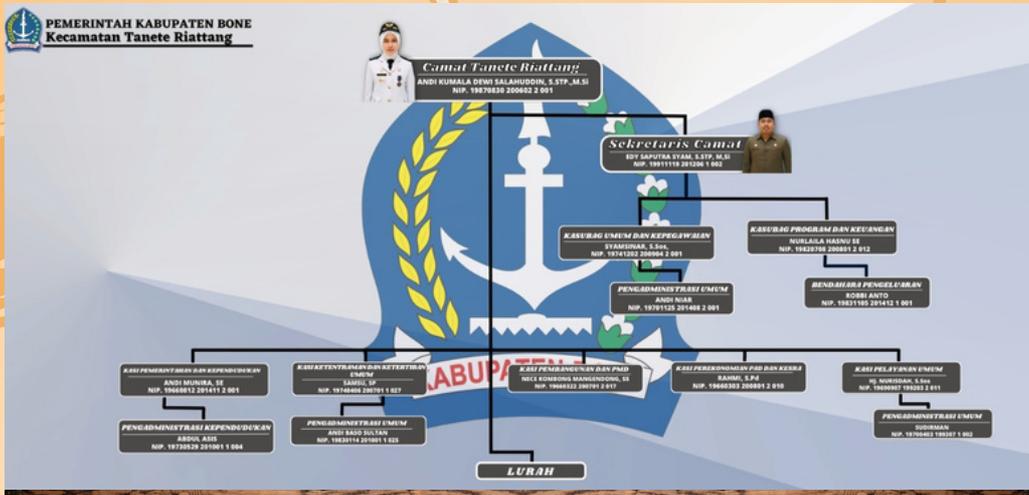
1. Kelurahan Biru
2. Kelurahan Masumpu
3. Kelurahan TA
4. Kelurahan ManurungngE
5. Kelurahan Watampone
6. Kelurahan Bukaka
7. Kelurahan Walannae
8. Kelurahan Pappolo



Pembentukan SKPD Kecamatan Tanete Riattang tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok Kecamatan Tanete Riattang yang dipimpin oleh Camat adalah membantu Bupati melaksanakan pemerintahan di wilayah Kecamatan dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud, Kecamatan mempunyai fungsi:

1. Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum;
2. Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. Pengordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. Pengordinasian penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
5. Pengordinasian pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
6. Pengordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di tingkat kecamatan;
7. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan kegiatan desa dan/atau kelurahan;
8. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintahan daerah yang ada di Kecamatan;
9. Pelaksanaan fungsi lain yang diperintahkan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Perangkat Daerah Kecamatan Tanete Riattang diatur dalam Peraturan Bupati Bone Nomor 94 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memiliki susunan organisasi sebagai berikut :



Susunan kepegawaian dan jumlah personil di SKPD Kecamatan Tanete Riattang sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Komposisi SDM Organisasi Kecamatan Tanete Riattang

Kondisi Pegawai	Jenis Kelamin		Pendidikan						Golongan							
	PR	LK	S2		S1/D4		SMA		IV		III		II		I	
			PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK
Struktural	24	14	2	3	20	11	2	-	1	-	23	14	-	-	-	-
Fungsional Umum	7	8	-	-	1	1	6	7	-	-	2	2	5	4	-	2
JUMLAH	31	22	2	3	21	12	8	7	1	-	25	16	5	4	2	2

Sumber Data : Bezetting Pegawai Tanete Riattang Keadaan 31 Desember 2022

Gambar. 1 Bagan Komposisi Pegawai Kecamatan Tanete Riattang



Sumber Data : DUK Tanete Riattang Desember 2022



C. ISU STRATEGIS

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah maupun masyarakat di masa akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah

keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dan dalam hal tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan permasalahan, Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone, telaahan RTRW dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, maka isu-isu strategis yang dihadapi oleh Kecamatan Tanete Riattang dapat kita lihat dalam aspek-aspek berikut :

➤ **Aspek Kelembagaan**

1. Kualitas dan kuantitas SDM yang masih kurang dibanding dengan beban kerja;
2. Dukungan anggaran yang belum cukup memadai;
3. Kemajuan teknologi dan informasi yang begitu cepat menuntut kesigapan dari aparatur pemerintahan untuk tetap dan terus belajar;
4. Sistem pengawasan melekat baik dari Pemerintah Pusat, LSM, maupun masyarakat menuntut akuntabilitas, transparansi, dan responsibilitas aparatur pemerintahan dalam memberikan pelayanan dan melaksanakan tugas kedinasan;
5. Belum adanya konsep tentang pengembangan SDM, yang ada selama ini Pemerintah hanya sebatas memberikan motivasi untuk berusaha, tetapi kurang memberikan peningkatan keterampilan (skill) bagi aparatur pemerintah sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan SDM yang telah mengikuti Diklat hanya sebanyak 12 orang dari 53 total ASN atau 22.6 %.

➤ **Pengembangan dan Pemanfaatan Lingkungan yang Kondusif**

1. Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pengawasan, serta minimnya dana pendukung kegiatan yang ada di Kecamatan sehingga menyebabkan potensi aparatur pemerintah belum dapat dimanfaatkan secara optimal.
2. Kecamatan Tanete Riattang sebagai kecamatan ibukota saat ini tengah berhadapan dengan masalah sosial dan tata kota, seperti maraknya pergaulan bebas, kasus narkoba dengan ditemukannya 12 Kasus di Tahun 2021, meningkat menjadi 19 kasus di Tahun 2021 dan jumlah kasus 45 di tahun 2022, remaja pengisap lem, dan peredaran miras, masalah persampahan, hewan ternak yang berkeliaran di dalam kota, pedagang kaki lima yang kurang tertata, dan pengemis yang mulai bermunculan di sekitar jalan protokol di dalam kota.

3. Sebagian wilayah Kecamatan Tanete Riattang termasuk dalam kawasan rawan banjir, yakni antara lain Kelurahan Biru, Kelurahan Masumpu, dan Kelurahan Ta'.

Selain Isu Strategis yang klasik dalam Dokumen Renstra, Kecamatan Tanete Riattang juga tengah berupaya bangkit dari Bencana Non Alam - Pandemi Corona Virus 2019 (COVID-19). Pandemi ini telah menimbulkan berbagai masalah serius yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas. Masalah yang ditimbulkan meliputi masalah kesehatan, dampak ekonomi baik terhadap rumah tangga maupun para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah serta masalah sosial.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat, instansi pemerintah diharapkan dapat memberikan kemudahan dalam mengayomi dan sebagai garis depan penyelenggaraan pemerintahan dalam melayani masyarakat yang berada di tingkat kecamatan. Kecamatan memiliki posisi yang strategis, sehingga apapun yang menjadi kinerja kecamatan merupakan kinerja Kabupaten. Tata kelola sistem pemerintahan serta pelayanan kecamatan yang baik akan berdampak terhadap birokrasi yang bersih, profesional, dan berwibawa. Pada sisi lain tata kelola pemerintahan serta pelayanan kecamatan yang baik akan memberikan efek positif terhadap tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tegaknya supremasi hukum, transparansi dalam penyelenggaraan kelola pemerintahan, efektif dan efisien.

1. Dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik oleh Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang atas pengimplementasian Aplikasi Pelayanan Kependudukan





berbasis Database Kependudukan. Aplikasi "**DILAN KE TANETE RIATTANG**" (Digitalisasi Layanan Administrasi Kependudukan Kecamatan Tanete Riattang) sebagai komplemen layanan PATEN yang terintegrasi melalui Data Base Penduduk di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dengan adanya **DILAN KE TANETE RIATTANG** pelayanan Adminduk yang selama ini

mewajibkan masyarakat untuk melalui alur pelayanan yang panjang dengan alur dari kelurahan ke kecamatan, dan selanjutnya ke kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil. Masyarakat hanya cukup sampai di kantor Kelurahan saja untuk mendapatkan pelayanan administrasi kependudukan kecuali layanan E-KTP dan KIA. Khusus layanan pemutakhiran data kependudukan diharapkan menjadi solusi demi mewujudkan tertib data kependudukan secara realtime dan online

2. "**SI LAYAK**" (Sistem Layanan Langsung Administrasi Kependudukan) pada Kantor Lurah Biru Kecamatan Tanete Riattang merupakan bentuk pelayanan administrasi kependudukan kepada masyarakat melalui stakeholder terkait dengan berbasis aplikasi data kependudukan yang



terintegrasi pada data kependudukan yang valid sehingga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan administrasi kependudukan.

Terselenggaranya layanan administrasi kependudukan bagi masyarakat yang lebih



cepat, efektif dan efisien melalui sistem layanan yang dilakukan secara langsung dengan kolaborasi dan kemitraan stakeholder terkait secara online berdasarkan pengelolaan aplikasi data dan informasi kependudukan pada Kantor Lurah Biru Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone.

3. Layanan Informasi dan Pengaduan Bantuan Sosial Keluarga Penerima Manfaat atau "**LIPBAS KPM**" adalah pemberian pelayanan secara maksimal kepada masyarakat khususnya Keluarga Penerima Manfaat terhadap kebutuhan informasi, layanan pengaduan dan solusi dari permasalahan terkait Bantuan



4. Sejalan dengan itu, Kelurahan Ta' Menempuh pelayanan aduan bagi masyarakat melalui "**DILAMAR**" (Layanan Aduan Masyarakat) adalah layanan aduan masyarakat berbasis whatsapp.

Memudahkan masyarakat untuk melaporkan aduannya terkait masalah-masalah yang terjadi di lingkungan sehingga dapat ditanggapi secara tepat cepat dan tepat.

5. "**GERAI MASKULIN**" adalah berupa usaha pendekatan layanan ke tengah-tengah masyarakat yang bertujuan untuk mengefektif dan mengefesienkan proses pemberian pelayanan.



6. Dari aspek kebersihan beberapa inovasi ditempuh oleh Kelurahan Bukaka, Pappolo dan Watampone.

a. KSM Mulia Sejahtera adalah hasil implementasi daripada inovasi Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang dan Kelurahan Bukaka pada tahun 2021 dalam pengelolaan lingkungan. Dan sebagai tindak lanjut di unit kerja terkecil, Pemerintah Kelurahan Bukaka memberdayakan KSM Mulia Sejahtera tersebut melalui kegiatan "**Bersih Lingkunganku, Aman Ternak Ku**" yakni pengelolaan sampah organik menjadi ramah lingkungan yaitu menjadi pakan ternak.



Diharapkan dengan adanya kegiatan swadaya masyarakat ini keindahan lingkungan bisa ditingkatkan dan dampak penurunan kualitas kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan dan kenyamanan lingkungan dapat diminimalisir yang diakibatkan oleh penumpukan sampah organik yang dibiarkan begitu saja tanpa dimanfaatkan.

b. Kelurahan Watampone membuat terobosan dengan melaksanakan "**Kelompok Swadaya Masyarakat Pengelola Sampah (PELAPA)**" Kecamatan Tanete Riattang. Dengan adanya **KSM PELAPA** tentunya kelompok tersebut mampu



mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa sampah itu tidak sekedar di buang tapi mampu di kelola dengan baik sehingga tercipta sumber perekonomian baru. Dengan pengelolaan sampah yang baik mampu menciptakan

pemberdayaan dan kemandirian masyarakat dalam mengelola sampah sehingga mempunyai nilai ekonomis. Dalam kegiatan tersebut sampah dibuat kerajinan yg bermanfaat bagi rumah tangga sekaligus bisa dipromosikan kerajinan sebagai kerajinan dengan kearifan lokal KSM PELAPA di Kelurahan Watampone antara lain Pembuatan Tas, Tempat Sendok, Tempat Air Mineral, Tempat Tissue dan lain-lain.

- c. Meurujuk pada Peraturan Peraturan menteri PAN-RB Nomor 30 Tahun 2014 tentang Pedoman Inovasi Pelayanan Publik. Pemerintah Kelurahan Pappolo mengimplementasikan inovasi **"PAPPI SAMSON"** (Pappolo Pilah Sampah menjadi Sedekah Sampah Anorganik). Adalah pengelolaan sampah dengan *membentuk satgas pemilahan* pada setiap lingkungan dan membuat wadah pemilahan sampah *Anorganik*.



Sampah Anorganik yang terkumpul kemudian dijual dan hasil penjualannya disedekahkan ke rumah ibadah yang ada di Kelurahan Pappolo. Inovasi ini diharapkan mampu menjawab permasalahan mengenai sampah Anorganik disamping itu memberdayakan masyarakat akan pentingnya mengelola sampah dan menjadikannya lebih bermanfaat bagi kehidupan.

7. Salah satu hal yang cukup membanggakan adalah Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang pada tahun 2022 kembali berhasil meningkatkan capaian realisasi Pajak Bumi dan Bangunan melalui pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan dalam kurun waktu 70 hari setelah lembaran SPPT dibagikan kepada para kolektor dengan nominal Rp. 1.782.960.813,-. Tentunya hal ini tidak terjadi begitu saja tetapi merupakan hasil dari kolaborasi dan kekompakan seluruh Kolektor Kelurahan dan Pemerintah Kecamatan sehingga Kecamatan

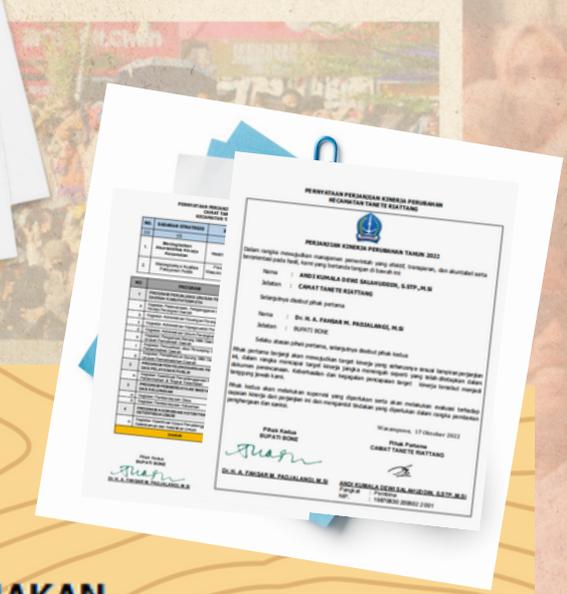
Tanete Riattang menduduki posisi ke 4 dalam urutan pelunasan tecepat untuk Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022. Untuk hal itu Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang menggelar PBB Awards sebagai ajang apresiasi dan pemberian penghargaan bagi Kelurahan Tercepat Lunas Kelurahan Bukaka (20 hari), Kelurahan Pappolo dan Masumpu (44 Hari) terhitung sejak tanggal dibagikannya SPPT. Kelurahan Watampone menyelesaikan PBB pada tanggal 20 Juni(61 Hari) Kelurahan Ta melakukan pelunasan pada tanggal 27 Juni 2022 (68 Hari), Kelurahan Manurungnge dan Kelurahan Biru tanggal 28 Juni 2022 (69) hari, dan Kelurahan Walannae pada tanggal 29 Juni 2022 (70 Hari).

Kelurahan	SPPT	Realisasi	Tanggal Lunas	Hari Lunas
1. BUKAKA	854.321.212	854.321.212	04/06/2022	20
2. PAPPOLO	1.000.000.000	1.000.000.000	12/06/2022	44
3. MASUMPU	1.100.000.000	1.100.000.000	12/06/2022	44
4. WATAMPONE	1.100.000.000	1.100.000.000	20/06/2022	61
5. TA	1.100.000.000	1.100.000.000	27/06/2022	68
6. MANURUNGNGE	1.100.000.000	1.100.000.000	28/06/2022	69
7. BIRU	1.100.000.000	1.100.000.000	28/06/2022	69
8. WALANNAE	1.100.000.000	1.100.000.000	29/06/2022	70
9. TANETE RIATTANG	1.100.000.000	1.100.000.000	30/06/2022	71

CAMAT TANETE RIATTANG
mengucapkan
SELAMAT DAN TERIMA HASIH
kepada
Pemerintah Kelurahan dan seluruh warga
se- Kecamatan Tanete Riattang
atas
REALISASI PBB 100% TAHUN 2022
KECAMATAN TANETE RIATTANG
Dalam Kurun Waktu 10 Hari
(20 April - 29 Juni 2022)

"Mari Bersama Membangun Negeri"
ANDI KUMALA DEWI SALAHUDDIN, S.STP., M.Si
CAMAT TANETE RIATTANG





BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. TUJUAN DAN SASARAN

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

D. PERJANJIAN KINERJA

E. STANDART PENILAIAN KINERJA



BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan Dan Sasaran

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu - isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Tanete Riattang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Kecamatan. Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone 2018-2023. Rencana Strategis (RENSTRA) sebagai dokumen perencanaan yang memuat penjabaran tujuan, sasaran dan program Perangkat Daerah selama 5 tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Visi merupakan arah atau kondisi ideal di masa depan yang ingin dicapai (Clarity of Direction) berdasarkan situasi dan kondisi saat ini. Bupati dan Wakil Bupati Bone Terpilih telah menetapkan visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah tahun 2018-2023 yang merupakan penjabaran dari Visi, yaitu sebagai berikut:

"MASYARAKAT BONE YANG MANDIRI, BERDAYA SAING DAN SEJAHTERA'

Dalam mencapai visi tersebut telah ditetapkan misi yang dapat mendorong tercapainya visi dimaksud. Kecamatan Tanete Riattang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk meningkatkan dan mewujudkan pemerintahan yang baik (Good Governance) dan terwujudnya pelayanan masyarakat yang cepat, murah, pasti, terjangkau dan berkualitas. tercapainya visi dengan melaksanakan misi Kabupaten Bone .

Berdasarkan pada rumusan Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, maka misi yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut

1. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
2. Mengembangkan kemandirian ekonomi masyarakat dan meningkatkan taraf kehidupan masyarakat .

3. Meningkatkan akses, pemerataan, dan kualitas pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial dasar lainnya.
4. Mengoptimalkan akselerasi pembangunan daerah berbasis desa dan kawasan perdesaan.
5. Menciptakan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah untuk peningkatan pelayanan publik.
6. Meningkatkan budaya politik, penegakan hukum, dan seni budaya dalam kemajemukan masyarakat.

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra 2018-2023



Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target Kinerja pada Tahun ke -				
		2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat Nilasi SAKIP oleh APIP	Predikat B >60-70	Predikat B >60-70	Predikat BB >70-80	Predikat A >80-90	Predikat AA >90-100
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Stadar Pelayanan	93%	95 %	100 %	100 %	100 %

Sumber Data : Rentsra Perubahan Kecamatan Tanete Riattang 2018-2023

B. Strategi Dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan langkah-langkah prioritas yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dari misi pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi diturunkan dalam kebijakan dan program pembangunan sebagai upaya operasional yang bermuara pada tercapainya visi pembangunan.

1. Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pemangku jabatan / pemangku kepentingan di lingkup Kecamatan Tanete Riattang.
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
3. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat dan stakeholder lain yang terkait

Adapun arah kebijakan Perangkat Daerah, yakni turunan dari kebijakan Pemerintah Kabupaten Bone dengan mempertimbangkan semua potensi, peluang, kendala dan

ancaman yang mungkin ada di wilayah Kecamatan Tanete Riattang. Selanjutnya kebijakan tersebut dijadikan pedoman bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan. Berikut kebijakan yang dilaksanakan Pemerintah Kecamatan sebagai tindak lanjut dari kebijakan Pemerintah Kabupaten :

1. Mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pemangku jabatan / pemangku kepentingan di lingkup Kecamatan Tanete Riattang.
 - a. Penyediaan sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang belum ada.
 - b. Perbaikan sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang rusak.
 - c. Pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial dasar.
 - d. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah.
 - e. Pelaksanaan komunikasi dan silaturahmi secara berkala dengan masyarakat dan stakeholder lain yang terkait.
2. Menggalang partisipasi masyarakat dalam menciptakan keamanan dan ketertiban.
 - a. Meningkatkan upaya antisipasi dan cegah dini terhadap konflik dan kerawanan sosial.
 - b. Mengupayakan kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban.
 - c. Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan masyarakat, dan stakeholder lain yang terkait.

Berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka strategi dan kebijakan Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2018-2023 disesuaikan dengan misi Kabupaten Bone, disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.2 Tabel Strategi dan Kebijakan Kecamatan Tanete Riattang

VISI : "Masyarakat Bone Yang Mandiri, Berdaya Saing, dan Sejahtera."			
MISI I : Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.	Mengoptimalisasi pelaksanaan tugas dan fungsi para pemangku jabatan / pemangku kepentingan di lingkup Kecamatan Tanete Riattang.	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Menyediakan sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang belum ada. ✓ Memperbaiki sarana dan prasarana layanan sosial dasar yang rusak. ✓ Melaksanakan pemerataan ketersediaan sarana dan prasarana layanan sosial dasar. ✓ Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi Aparatur Pemerintah. ✓ Melaksanakan komunikasi dan koordinasi secara berkala dengan masyarakat dan stakeholder lain yang terkait.

Sumber Data : Rentsra Perubahan Kecamatan Tanete Riattang 2018-2023

C. Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan organisasi yang pada akhir periode Renstra dijadikan sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif, merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (outcomes) dari kegiatan (output).



Indikator kinerja juga dapat memberi gambaran tentang prestasi yang diharapkan di masa mendatang. Indikator dan target kinerja dinyatakan dengan jelas pada tahap perencanaan dan pada akhir pelaksanaan. Hal ini untuk menjamin aspek akuntabilitas pencapaian kinerja. Oleh karena itu, target kinerja harus menggambarkan secara langsung pencapaian sasaran Renstra dan memenuhi kriteria specific, measurable, achievable, relevant, time bond dan continuously improve (SMART-C).

Penetapan indikator kinerja kecamatan bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi Kecamatan Tanete Riattang. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator outcome program pembangunan daerah setiap tahun atau indikator capaian yang bersifat mandiri setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai.

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja OPD yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai OPD dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja Kecamatan Tanete Riattang ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone

Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	Nilai Predikat SAKIP berdasarkan Hasil	Inspektorat Daerah Kabupaten Bone	Camat

Tujuan / Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Penjelasan / Formulasi Penghitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	$\frac{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Dilayani / Ditindaklanjuti sesuai Standar}}{\text{Jumlah Pelayanan Publik yang Masuk}} \times 100\%$	Seksi Pemerintahan dan Kependudukan, Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum, Seksi Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Seksi Perekonomian, Pendapatan Asli Daerah dan Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Pelayanan Umum	Camat

Sumber Data : Rentsra Perubahan 2018-2023 Kecamatan Tanete Riattang

D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian Kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Tahun 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	24.635.922.985,-
Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik 	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.633.400,-
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.185.898.601,-
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000,-
JUMLAH				25.863.454.986,-

Sumber Data : Perjanjian Kinerja Perubahan 2022 Kecamatan Tanete Riattang

E. Standart Penilaian KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Standar penilaian kinerja terhadap laporan kinerja perangkat daerah merupakan tolok ukur keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan dan sub kegiatan. Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone maka telah ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program, kegiatan Rumus yang digunakan untuk menghitung % capaian target indikator kinerja adalah:

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

2.5 Tabel Skala Pengukuran Ordinal

Nilai %	Pencapaian
110 ke atas	Sangat Tercapai / Sangat Berhasil
$90 \leq x \leq 110$	Tercapai / Berhasil
$60 \leq x \leq 90$	Cukup Tercapai / Cukup Berhasil
$x \leq 60$	Tidak Tercapai / Tidak Berhasil

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam PERMENPAN 12 tahun 2015, yang terdiri:

2.6 Tabel Skala Perhitungan Kinerja Untuk Indiaktor Evaluasi SAKIP oleh APIP

Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Sumber Data : PERMENPAN 12 Tahun 2015



(Jumat Bersih Lingkungan) Kantor Lurah P



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- B. REALISASI ANGGARAN

Rabu, 20 April 2022

PENYERAHAN SPPT PBB TAHUN 2022 DAN RAPAT PERSIAPAN REALISASI PBB TANETE RIATTANG

f kecamatan tanete riattang i KerjanyaTaneteRiattang

TUJUAN

Meningkatkan akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang

SASARAN

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

STRATEGI

Mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi para pemangku jabatan / pemangku kepentingan di lingkup Kecamatan Tanete Riattang.

GERAI LAYANAN MASYARAKAT LINGKUNGAN BIRU 2 KELURAHAN MASUMPU

Jumat, 13 Mei 2022

f Kecamatan Tanete Riattang i KerjanyaTaneteRiattang

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur dan dapat dikuantifikasi dan diukur. Rincian tingkat capaian sasaran yang telah ditetapkan dengan melihat tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja diuraikan sebagai berikut

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan dengan indikator:

⇒ Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP

Sasaran 1.1:

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik, dengan indikator:

⇒ Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan

1. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022

Capaian Kinerja tahun anggaran 2022 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasinya pada tahun 2022 sebagaimana dijelaskan dalam tabel berikut :

3.1 Tabel Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	A	A*	100%	Tercapai / Berhasil

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2022	Realisasi 2022	Capaian Kinerja	Keterangan
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	% Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100%	100%	1007%	Tercapai / Berhasil
Rata-rata				100 %	Tercapai / Berhasil

Sumber Data: Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022 *berdasarkan penilaian internal

Berdasarkan Tabel di atas, rata-rata capaian antara tujuan dan sasaran strategis kecamatan yang didukung oleh 2 indikator kinerja utama *berdasarkan hasil penilaian internal diperoleh predikat A* untuk Indikator Predikat Nilai SAKIP oleh APIP dengan capaian 100%, adalah Berhasil/Tercapai, sedangkan untuk sasaran indikator kedua % Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan sudah Tercapai/Berhasil dengan capaian 100%.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2023

Tahun 2022 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tanete Riattang 2018-2023. Adapun realisasi dan capaian kinerja Kecamatan Tanete Riattang apabila disandingkan dengan tahun sebelumnya diperoleh matriks sebagai berikut :



3.2 Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik	% pelayanan kepada masyarakat yang dilaksanakan sesuai SOP.	100	100	100	100	100	100
Meningkatnya kualitas dan kuantitas pelayanan publik.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik% pengaduan pelayanan publik dari masyarakat yang dapat ditindaklanjuti / diselesaikan.	100	100	100	100	100	100
	% usulan pembangunan Hasil Musrenbang Kelurahan yang dapat direalisasikan.	40	50	60	100	100	100
Menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat	% gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat yang dapat diselesaikan.	100	100	100	100	100	100
	Terciptanya keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.	% penurunan pelanggaran terhadap Perda.	100	100	100	100	100

Sumber Data : Rentsra Perubahan Kecamatan Tanete Riattang 2018-2023

3.3 Tabel Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2019-2023

Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja					Capaian Kinerja				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	B	B	BB	A	A*		100%	125%	120%	100%*	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %		105,26 %	100 %	100 %	100%	

Sumber Data : Data Capaian Kinerja Kecamatan Tanete Riattang 2019-2022

Dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa hanya 1 indikator kinerja utama kecamatan Tanete Riattang yang dapat disandingkan % capaian kinerjanya dengan Tahun sebelumnya yaitu indikator Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan. Capaian Indikator ini tahun 2019 (105,26%) dan tetap pada angka 100% sampai dengan tahun berjalan.

Sedangkan untuk indikator predikat Hasil SAKIP oleh APIP % capaian kinerjanya belum dapat disandingkan karena merupakan IKU Baru, tetapi realisasi kinerja pada indikator ini telah tercapai 100% sesuai dengan target tahun keempat pada Rencana Strategis Perubahan 2018-2023 Kecamatan Tanete Riattang

3. Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Kecamatan Tanete Riattang Perubahan Tahun 2018 – 2023 seperti dalam tabel di bawah ini :

3.4 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja 2022 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja					Capain Kinerja (%)				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Predikat Nilai SAKIP oleh APIP	AA	B	BB	A	A*		57,14	71,43	85,71	85,71	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100%	100%	100%	100%	100%		100	100	100	100	

Sumber Data : Rentsra Perubahan 2018-2023 Kecamatan Tanete Riattang dan LHE Sakip oleh APIP

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa untuk Indikator kinerja utama yang pertama Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP **belum** mencapai target jangka menengah, sedangkan untuk indikator kedua Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan sudah mencapai target jangka menengah.

4. Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standart Nasional Lainnya serta dengan Kecamatan Kota sekitar

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tanete Riattang dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut :

3.5 Tabel Realisasi Kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standart Nasional Lain

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Standart Nasional	
			Target 2022	Target 2023
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A*	-	-

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Standart Nasional	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100%	-	-

Sumber Data : Pengukuran Kinerja Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tanete Riattang tidak dapat disandingkan dengan standard nasional karena tidak melaksanakan Standar Pelayanan Minimal/standar Nasional lainnya

3.6 Tabel Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Kecamatan Sekitar

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2022	Kecamatan Sekitar		Keterangan
			Tanete Riattang Barat	Tanete Riattang Timur	
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A*	A*	BB*	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100%	100%	99	

Sumber Data : LHE SAKIP Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan Tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tanete Riattang setara dengan Kecamatan Tanete Riattang Barat dan Lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Tanete Riattang Timur.

5. Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis kita lihat tabel ikhtisar pencapaian capaian kinerja sebagai berikut:

3.7 Tabel Analisa Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-rata Capaian	Predikat			
				≥ 110	90 = <s/d <110	80 = <s/d <90	<60
				Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	100	100%		√		
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100	100%		√		
Rata-rata			100%		√		

Sumber Data : Data Pengukuran Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan data pada table diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Kecamatan Tanete Riattang tahun 2022 dalam kategori **Berhasil**.

Analisa penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian indikator kinerja sasaran strategis dijelaskan sebagai berikut :

Tujuan :

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang dengan indikator :

⇒ **Hasil Evaluasi Sakip Oleh APIP**

Evaluasi atas implementasi SAKIP dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja secara lengkap dan menyeluruh. Kelima komponen manajemen kinerja tersebut adalah : 1) Perencanaan Kinerja; 2) Pengukuran Kinerja; 3) Pelaporan Kinerja; 4) Evaluasi Kinerja; dan 5) Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Indikator ini diperoleh capaian kinerja 100 %, hal ini dapat dicapai dengan Pelaksanaan hasil review SAKIP oleh APIP berupa

- a. Perbaikan pada dokumen perencanaan yang selaras dengan Renstra Perubahan Kecamatan Tanete Riattang 2018-2023 dan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Kecamatan Tanete Riattang.
- b. Pelaksanaan verifikasi data pada pengukuran Kinerja secara berkala (per Triwulan).
- c. Pelaksanaan Rekonsiliasi data dan bukti dukung kinerja yang dipimpin oleh Camat Tanete Riattang.

Meskipun pencapaian kinerja 100% atas Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP, namun hal ini diraih dengan kerja keras mengatasi beberapa hambatan seperti :

- d. Penyesuaian Dokumen Perencanaan terbatas karena mengacu pada beberapa peraturan dan kebijakan
- e. Masih perlunya peningkatan kesadaran para pelaksana dalam pengimplemnasian SAKIP
- f. Diperlukannya data dukung kinerja yang terdokumentasi lengkap.

Sasaran

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan indikator:

⇒ **Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan**

Presentase pelayanan Kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan adalah jumlah pelayanan public yang dilayani/ditindak lanjuti sesuai standar dibagi jumlah pelayanan public yang masuk kali 100%.



$\frac{\text{Jumlah pelayanan public yang dilayani / ditindak lanjuti sesuai standar}}{\text{Jumlah pelayanan public yang masuk}} \times 100$	$= 100\%$
$\frac{5380 \text{ Pelayanan}}{5380 \text{ Pelayanan}} \times 100$	

Jenis pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Tanete Riattang sebagai berikut :

1. Pengantar Kartu Tanda Penduduk sebanyak 1581 berkas
2. Pengantar Kartu Keluarga sebanyak 2457 berkas
3. Pengantar Surat Keterangan Pindah sebanyak 637 berkas
4. Surat Izin Mendirikan Bangunan sebanyak 26 berkas
5. Surat Pengantar Akta Kelahiran sebanyak 238 berkas
6. Surat Pengantar SKCK sebanyak 16 berkas
7. Surat Keterangan Ahli Waris sebanyak 298 berkas
8. Surat Keputusan Dispesasi Nikah sebanyak 127 berkas

Indikator ini diporeleh capaian kinerja 100 % hal ini didukung oleh :

1. Telah diimplementasikannya **DILAN KE TANETE RIATTANG, GERAJ MASKULIN** dan **SI LAYAK** sebagai kompelem aplikasi PATEN Pelayanan Publik demi terwujudnya pelayanan yang lebih efektif dan efisien.
2. Telah tersusunnya Peta Proses Bisnis Kecamatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
3. Terdapat SOP pada setiap jenis layanan
4. Adanya tunjangan Kinerja Pegawai yang menjadi motivasi kerja pegawai dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat
5. Telah dilakukan Bimtek Pelayanan Prima kepada beberapa ASN di Kecamatan.
6. Pengawasan dan evaluasi secara berkala oleh atasan langsung

6. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki Kecamatan Tanete Riattang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Sumber daya yang dimiliki Kecamatan Tanete Riattang adalah sumber daya manusia, sarana prasarana kantor dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan anggaran 2022 untuk melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses. Semakin hemat/sedikit penggunaan sumber daya, maka prosesnya dikatakan semakin efisien. Berikut tabel untuk menganalisis efisiensi sumber daya Kecamatan Tanete Riattang dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan

3.8 Tabel Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Tujuan / Sasaran Starategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi Sumber Daya (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi	Capaian (%)	
(a)	(b)	(c)	(d)	(e) (d/c x100%)	(f)	(g)	(h) (g/f x 100%)	(i) (e - h)
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	A*	100 %	24.635.922.985	24.184.194.112	98,17	1,83
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100%	100%	100%	1.227.532.001	1.206.679.692	98,30	1,70

Sumber Data : Data Capaian Kinerja Tahun 2022

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa pada pelaksanaan kegiatan Kecamatan Tanete Riattang terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan capaian kinerja 100 % dan % capaian realisasi anggaran 98,17 %, menunjukkan bahwa adanya efeseinsi sebesar 1,83%.
2. Indikator % Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standar Pelayanan dengan capaian kinerja 100% dan % capaian realisasi anggaran 98,30 %, menunjukkan bahwa efisiensi anggaran penggunaan sumber daya sebesar 1,70 %.

7. Analisis Program / Kegiatan / Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

- a. Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang dilaksanakan Kecamatan Tanete Riattang sebagai berikut :

3.9 Tabel Analisis terhadap program/kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Keberhasilan / Kegagalan Pencapaian Kinerja

NO	TUJUAN / SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA OUTCOME/OUTPUT	SATUAN KINERJA	TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	TINDAK LANJUT
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Tanete Riattang		Hasil Evaluasi Sakip oleh APIP	Predikat	A	A	100	Impelemntasi Review APIP oleh APIP
	Meningkatnya kualitas pelayanan publik		Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	%	100	98,30	98,30	Meningkatkan Sarana Prasarana yang ada termasuk SDM Pemberi Layanan
		Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	% Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	%	100	100	100	Perlunya adanya komitmen antara pihak terkait di lingkup kecamatan dan kelurahan untuk merampungkan data yang diperlukan dalam penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dokumen	3	3	100	Ketersediaan Standart Harga yang dapat diaktualisasikan
		Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja yang tersusun	Laporan	2	2	100	Keikutsertaan SDM pada Bimbingan Teknis bagi Penyusun Laporan LPPD dan LKPJ

	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Penyusunan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang terealisasi	Dokumen	2	2	100	Penyediaan Dokumen pendukung yang valid
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	% Jumlah Realisasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	%	100	100	100	Pelaksanaan Koordinasi aktif dalam penentuan pagu anggaran
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12	12	100	Pengidentifikasi ASN penerima gaji dan tunjangan
	Pelaksanaan Penatausahaan Dan Pengujian / Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Realisasi Pembayaran Insentif / Honorarium per bulan bagi pengelola keuangan perangkat daerah	Bulan	12	12	100	Pemberian Pembinaan bagi SDM pelaksana penatausahaan keuangan
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Perentase Administrasi Kepegawaian Daerah yang terealisasi	%	100	127,27	127,27	Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran mengikuti anggaran perubahan daerah
	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Pasang	20	20	100	Perlu diadakan kesesuaian pagu anggaran supaya tidak terjadi pengembalian
	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Aparatur yang mengikuti Diklat	Orang	2	8	400	Koordinasi aktif dengan pihak penyelenggara Diklat sebelum memasuki tahun berjalan sehingga dapat ditetapkan jumlah kuota kekursewaan pada PD
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	% Administrasi Umum Perangkat Daerah yang terealisasi	%	100	105,19	105,19	Perlu adanya kelengkapan pengadministrasian umum yang memadai

	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Realisasi Pembayaran Jasa Listrik dan Jaringan Informasi yang terbayarkan	rekening	36	36	100	Perlu Adanya Kesesuaian Antara Jumlah Pemakaian Daya dengan Pelayanan Kinerja yang ada setiap bulannya.
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Realisasi Penyediaan Jasa Pelayanan Umum yang terbayarkan	Kali	72	72	100	Pengidentifikasi penggunaan jasa sesuai dengan spesifikasi dan kebutuhan PD
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	% Realisasi Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100	100	100	Perlu diupayakan sebaik mungkin terhadap pemeliharaan Barang Milik Daerah
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional yang Terpelihara dan Pajak Kendaraan yang Terbayarkan	Unit	3	3	100	Koordinasi BKAD bidang aset dalam hal pengelolaan aset yang habis masa manfaat/tidak layak
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang dipelihara secara rutin/berkala sesuai rencana kebutuhan perbulan	Paket	2	2	100	Pengidentikasin peralatan dan mesin sesuai kebutuhan untuk dianggarkan pengadaannya
	Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang terpelihara	Paket	9	9	100	Memberdayakan sumber daya tersedia dalam pemeliharaan gedung kantor salah satunya dengan Lomba Keindahan antar Wilayah Kerja
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Cakupan Realisasi Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	%	100	100	100	Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan Da lam hal pelayanan Publik
	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	% Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Terlaksana	%	100	100	100	Peran Aktif tiap unsur Pemerintah Tingkat Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik

		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal lainnya	Jumlah Kegiatan Koordinasi Dan Sikronisasi Perencanaan Perangkat Daerah Yang Diikuti	Kegiatan	1	1	100	Sinkronisasi porgram dan kegiatan
		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	Cakupan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	100	100	100	Diperlukan adanya kerja sama antar Tim dalam hal penyelesaian Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
		koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	% Realisasi Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	%	100	100	100	Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing
		Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kegiatan	12	12	100	Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	% Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan yang Terlaksana	%	100	100	100	Pengoptimalisasian kegiatan pemberdayaan kelurahan
		Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana yang terbangun di Kelurahan	Paket	8	8	100	Mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten terhadap Kewenangan Kelurahan dalam Pengelolaan anggaran Pembangunan Sarana Prasarana kelurahan
		Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	Kali	12	12	100	Diadakannya kegiatan untuk meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan di kelurahan
3		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	% Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Kecamatan	%	100	100	100	Diperlukan optimalisasi terhadap stakeholder dan pihak terkait dalam hal kordinasi ketentraman dan ketertiban umum

	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	% Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	100	100	100	meningkatkan Kordinasi dengan stakeholder terkait
	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, TNI dan Instansi Vertikal di wilayah Kecamatan	Kali	12	12	100	Perlu Diadakan Rapat Kordinasi Lintas Sektor Secara Rutin dan Berkala

Berdasarkan Tabel dapat dijabarkan bahwa Indikator Predikat Nilai Sakip oleh APIP tercapai / berhasil dengan didukung dengan oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone dengan beberapa kegiatan antara lain :

1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Dari ketujuh Kegiatan ini ada 2 kegiatan yang melebihi target kinerja yaitu Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah sebesar 127,27% (terrealisasi 8 orang untuk target 2 orang) pada sub kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi dan Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 105% pada Sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (terrealisasi 308 Laporan dari target 290 Laporan).

Untuk Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dengan Indikator Persentase Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan berhasil tercapai 100% melalui pelaksanaan 3 (tiga) Program yang terdiri dari :

1. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - a) Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
2. Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - a) Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
 - b) Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan
3. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
 - a) Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum

Merujuk pada hasil evaluasi tahun 2022 dilakukan upaya perbaikan melalui :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone
 - ↳ Diperlukan pengefektifan sumber daya dalam pencapaian target secara kualitas dan kuantitas
- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - ↳ Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal pelayanan Publik berupa Peran Aktif tiap unsur Pemerintah Tingkat Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - ↳ Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan.
- ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - ↳ Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing baik pembinaan dan pengawasan, secara rutin dan berkala.

B. REALISASI ANGGARAN

3.10 Tabel Realisasi Keuangan Kecamatan Tanete Riattang Tahun Anggaran 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	24.635.922.985,-	24.184.194.112,-	98,17
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentas Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.633.400,-	14.633.400,-	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.185.898.601,-	1.165.046.292,-	98
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000,-	27.000.000,-	100
JUMLAH				25.863.454.986,-	25.390.873.804,-	98,17

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022

Berdasarkan Realisasi Laporan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tanete Riattang, dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait pencapaian sasaran sebesar Rp. 25.863.454.986, terealisasi Rp 25.390.873.804,- Atau 98,17%. Dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian kedua sasaran Dinas belum efektif 100% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar 1,83%. Dengan tingkat pencapaian efektivitas pencapaian sasaran 100% untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran.



Sisa anggaran sebesar 1,83% bersumber dari :

- Penyesuaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pedayagunaan Penggunaan Sumber Daya Listrik air dan Wifi, serta
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pencapaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.493.000,- bersisa Rp. 20.852.309,- hal ini disebabkan pembelanjaan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terealisasi karena terdapat perbedaan harga pada sistem dengan harga real barang.



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA
MENGATASI



Merujuk pada hasil evaluasi tahun 2022 dilakukan upaya perbaikan melalui :

- ✓ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone
 - ↳ Diperlukan pengefektifan sumber daya dalam pencapaian target secara kualitas dan kuantitas
- ✓ Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
 - ↳ Diperlukan kerjasama antar Tim dalam proses Penyelenggaraan Pemerintahan dalam hal pelayanan Publik berupa Peran Aktif tiap unsur Pemerintah Tingkat Kecamatan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik
- ✓ Program Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
 - ↳ Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan dan kelurahan.
- ✓ Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - ↳ Aktifnya para stakeholder sesuai dengan tugas dan peran masing-masing baik pembinaan dan pengawasan, secara rutin dan berkala.

B. REALISASI ANGGARAN

3.10 Tabel Realisasi Keuangan Kecamatan Tanete Riattang Tahun Anggaran 2022

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	Hasil Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone	24.635.922.985,-	24.184.194.112,-	98,17
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Persentas Pelayanan kepada Masyarakat yang dilaksanakan sesuai Standart Pelayanan	100 %	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	14.633.400,-	14.633.400,-	100
			Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	1.185.898.601,-	1.165.046.292,-	98
			Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	27.000.000,-	27.000.000,-	100
JUMLAH				25.863.454.986,-	25.390.873.804,-	98,17

Sumber Data : Laporan Realisasi Keuangan Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022

Berdasarkan Realisasi Laporan Realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Tanete Riattang, dari total belanja langsung program/kegiatan yang terkait pencapaian sasaran sebesar Rp. 25.863.454.986, terealisasi Rp 25.390.873.804,- Atau 98,17%. Dapat dikatakan penggunaan anggaran dalam upaya pencapaian kedua sasaran Dinas belum efektif 100% dan masih terdapat sisa anggaran sebesar 1,83%. Dengan tingkat pencapaian efektivitas pencapaian sasaran 100% untuk masing-masing indikator tujuan dan sasaran.



Sisa anggaran sebesar 1,83% bersumber dari :

- Penyesuaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Pedayagunaan Penggunaan Sumber Daya Listrik air dan Wifi, serta
- Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan dengan pencapaian kinerja 100% dengan realisasi keuangan sebesar Rp. 612.493.000,- bersisa Rp. 20.852.309,- hal ini disebabkan pembelanjaan untuk keperluan pemberdayaan masyarakat tidak dapat terealisasi karena terdapat perbedaan harga pada sistem dengan harga real barang.



BAB IV PENUTUP

A. SIMPULAN UMUM

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI



BAB III PENUTUP

A. Simpulan Umum

Penyelenggaraan kegiatan tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 4 Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tanete Riattang. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yang berkomitmen akan terus ditingkatkan untuk masa - masa yang akan datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimulai dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen perencanaan dan dan pengukuran kinerja pencapaian target kemudian dievaluasi untuk selanjutnya dianalisis sebagai bahan tolok ukur penetapan target kinerja pada masa berikutnya.

Capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dan kondisi global. Dan diperoleh bahwa capaian untuk kedua Indikator menunjukkan tingkat capaian 100% dengan kategori *berhasil*.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang terdapat pada BAB III, dapat terlihat upaya seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang dalam pencapaian target kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2022 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Inovasi - inovasi yang ada dikembangkan untuk mendukung pencapaian kinerja Pemerintah.

Meskipun pencapaian target tujuan dan sasaran telah tercapai namun hal ini bukan berarti tidak menemui kendala - kendala. Hal inilah yang menjadi fokus perbaikan dalam usaha pencapaian target kinerja kedepannya.

BAB III PENUTUP

A. Simpulan Umum

Penyelenggaraan kegiatan tahun Anggaran 2022 merupakan tahun ke 4 Rencana Strategis Perubahan Kecamatan Tanete Riattang. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak yang berkomitmen akan terus ditingkatkan untuk masa - masa yang akan datang.

Proses penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimulai dari pengumpulan dokumen-dokumen yang dibutuhkan seperti dokumen perencanaan dan dan pengukuran kinerja pencapaian target kemudian dievaluasi untuk selanjutnya dianalisis sebagai bahan tolok ukur penetapan target kinerja pada masa berikutnya.

Capaian kinerja sasaran yang dicerminkan dari capaian indikator kinerja sasaran ditentukan oleh berbagai faktor, antara lain sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana dan kondisi global. Dan diperoleh bahwa capaian untuk kedua Indikator menunjukkan tingkat capaian 100% dengan kategori *berhasil*.

B. Kendala Pelaksanaan dan Upaya Mengatasi

Dari hasil evaluasi dan analisis atas pencapaian sasaran dan IKU yang terdapat pada BAB III, dapat terlihat upaya seluruh perangkat Pemerintah Kecamatan Tanete Riattang dalam pencapaian target kinerja sebagai prioritas dalam pembangunan daerah. Upaya ini telah mencakup perumusan dan penetapan kinerja tahunan dan juga menengah sebagai bagian dari kebijakan strategis maupun tahunan daerah, khususnya dalam RENSTRA dan RENCANA KERJA (RENJA) Tahun 2022 yang mencakup juga penentuan program/kegiatan dan alokasi anggarannya. Inovasi - inovasi yang ada dikembangkan untuk mendukung pencapaian kinerja Pemerintah.

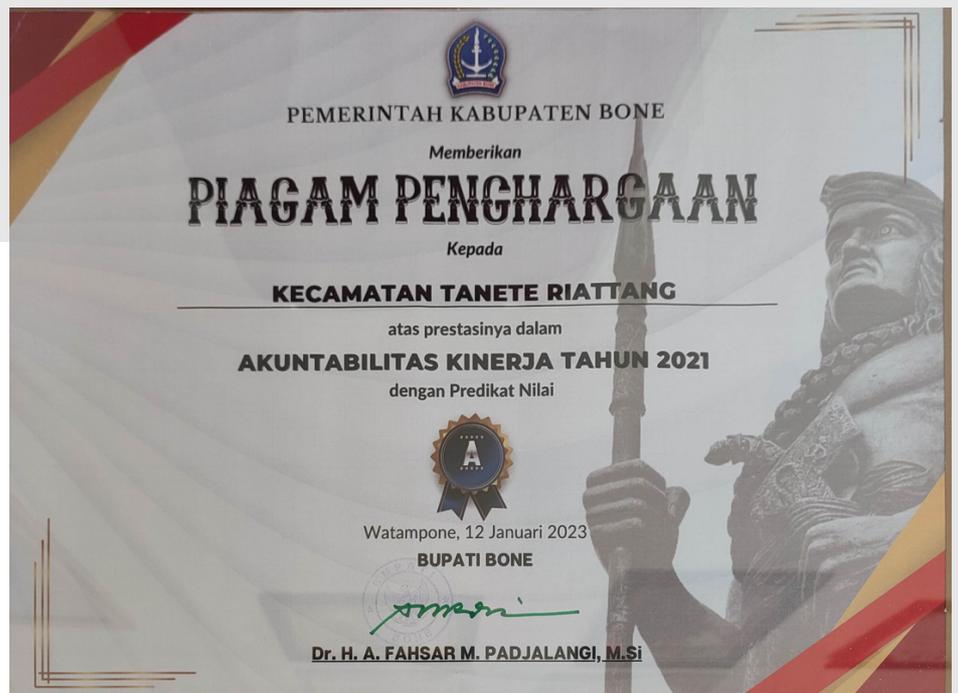
Meskipun pencapaian target tujuan dan sasaran telah tercapai namun hal ini bukan berarti tidak menemui kendala - kendala. Hal inilah yang menjadi fokus perbaikan dalam usaha pencapaian target kinerja kedepannya.

- ⇒ Kualitas Sumber Daya Manusia yang terbatas, melihat kondisi luas wilayah Kecamatan Tanete Riattang yang belum didukung dengan jumlah dan kualifikasi personil yang memadai.
- ⇒ Prasarana yang tersedia belum optimal, sehingga pelayanan tidak maksimal.
- ⇒ Koordinasi yang terlaksana telah dilaksanakan secara periodik namun hasil tersebut belum terimplementasikan secara komprehensif
- ⇒ Tergerusnya semangat masyarakat dalam bergotong royong yang menjadi salah satu indikator pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan.

Upaya-upaya yang telah ditempuh dalam pencapaian target sasaran dan tujuan :

1. Mengikutsertakan perangkat kecamatan dalam peningkatan kapasitas, serta pendagayagunaan berbagai inovasi dan aplikasi agar termanfaatkan secara efektif dan efisien.
2. Koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal Pemerintah Kecamatan secara lebih intensif;
3. Konsistensi dari Pemerintah kab/kota serta stakeholder terkait khususnya dalam penyediaan data pendukung kinerja guna mewujudkan satu data yang dapat dipercaya;
4. Implementasi Monitoring dan Evaluasi setiap kegiatan secara berkala agar pelaksanaan kegiatan tersebut dapat terus berkembang dan meningkat pada periode mendatang sesuai dinamika dan target yang telah ditetapkan.
5. Peningkatan kuantitas pendampingan kegiatan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, penyuluhan dan pengupayaan penggalangan kemitraan dengan pihak lain.

Demikian LKJIP Kecamatan Tanete Riattang Tahun 2022, yang dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan monitoring dalam pengambilan keputusan untuk pencapaian target dimasa yang akan datang.



lampiran



INOVASI

